



Penguatan Karakter Komunikasi Politik Berbasis Ideologi Politik Partai

Bakhtiar ^{a, 1*}, Sakman ^{b, 2}, Randiawan ^{a, 3}, M Yunasri Ridhoh ^{a, 4}

^a Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^b Universitas Palangka Raya, Indonesia

¹bakhtiar@unm.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Maret 2025;

Revised: 7 April 2025;

Accepted: 30 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Penguatan Karakter;
Komunikasi Politik;
Ideologi Partai Politik.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan karakter komunikasi politik, sejauhmana ideologi politik tercermin dalam komunikasi politik para kader, perlunya untuk melakukan penguatan karakter komunikasi politik yang sesuai dengan prinsip dan nilai perjuangan partai. Potensi timbulnya perbedaan antara komunikasi politik kader partai di tingkat pusat dengan realitas yang terjadi di daerah akan teratasi. Tujuan penelitian melihat nilai-nilai Ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karakter komunikasi politik berbasis ideologi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks partai politik, dan Bentuk-bentuk penguatan karakter komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikenal sebagai partai nasionalis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. *In-depth interview* dengan narasumber pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akademisi (pengamat politik), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasil penelitian menunjukkan penguatan karakter komunikasi politik Partai Indonesia Perjuangan berdasarkan nilai ideologis partai mencakup penguatan identitas nasionalisme, politik kerakyatan, dan keadilan sosial bagi keberpihakan pada *wong cilik* mencirikan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme. Kesimpulan penelitian ini memberikan gambaran upaya menjaga kesinambungan nilai-nilai ideologis partai dan karakter komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

ABSTRACT

Keywords:
Character Strengthening;
Political Communication;
Political Party Ideology.

Strengthening the Character of Political Communication Based on Party Political Ideology. *This research examines the problem of political communication character, the extent to which political ideology is reflected in the political communication of cadres, the need to strengthen the character of political communication in accordance with the principles and values of the party's struggle. The potential for differences between the political communication of party cadres at the central level and the reality that occurs in the regions will be resolved. The research aims to see the ideological values of the Indonesian Democratic Party of Struggle, the character of ideology-based political communication can be applied effectively in the context of political parties, and the forms of strengthening the political communication character of the Indonesian Democratic Party of Struggle known as a nationalist party. The research used a qualitative approach with descriptive methods. In-depth interviews with resource persons from administrators and cadres of the Indonesian Democratic Party of Struggle, academics (political observers), and members of the South Sulawesi Regional House of Representatives of the Indonesian Democratic Party of Struggle faction. The results showed the strengthening of the political communication character of the Indonesian Party of Struggle based on the party's ideological values including strengthening the identity of nationalism, populist politics, and social justice for siding with the little people characterizing the ideology of Pancasila June 1, 1945 and Marhaenism. The conclusion of this research provides an overview of efforts to maintain the continuity of the party's ideological values and the political communication character of the Indonesian Democratic Party of Struggle.*

Copyright © 2025 (Bakhtiar, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Bakhtiar, B., Sakman, S., Randiawan, R., & Ridhoh, M. Y. (2025). Penguatan Karakter Komunikasi Politik Berbasis Ideologi Politik Partai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 219–233.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11781>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ideologi dalam partai politik merupakan suatu aspek yang sangat fundamental dalam menentukan arah dan tujuan perpolitikan yang dihasilkan (Hasnu & Syam, 2021). Partai politik dalam aktivitas politiknya menyandarkan pada ideologi partai sebagai dasar perjuangan, Ideologi dalam partai politik menjadi semangat, nilai, dan prinsip perjuangan politik. Dalam aktivitas komunikasi politik nilai ideologi dijadikan sebagai tindakan yang menggambarkan pesan dan nilai-nilai perjuangan partai (Nurussa'adah & Sumartias, 2017). Keberadaan partai politik sangat strategis dan penting karena menjadi salah satu pilar dalam negara demokrasi, dalam perkembangan partai politik menjadi kendaraan dalam menyampaikan pesan-pesan politik dari masyarakat kepada pemerintah yang menjadi salah satu fungsi kehadiran partai politik (Heryanto, 2020). Jika partai politik menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah maka semestinya fungsi komunikasi politik berjalan dengan baik dalam kegiatan aktivitas politik.

Komunikasi politik menjadi langkah dalam menyampaikan pesan secara inherent dalam setiap fungsi sistem politik (Almond, 1960). Komunikasi politik berfungsi sebagai alat utama dalam membangun keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta berbagai sektor kehidupan politik. Selain menjadi media penyampaian ide dan aspirasi, komunikasi politik juga membentuk pola pikir serta perilaku politik masyarakat melalui identitas politik yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut (Kantaprawira, 1994; Soemarno, 2002). Melalui komunikasi politik yang efektif dilakukan oleh partai menjadi penghubung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bentuk edukasi publik mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Konteks ini menempatkan komunikasi politik menjadi penghubung untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai penguatan ideologi dalam pembangunan politik menggambarkan bahwa saat ini sulit untuk menentukan ideologi partai, karena tidak tercermin lagi dalam aktivitas politiknya, justru yang tergambar adalah kepentingan belaka. Sehingga menurut penelitian sebelumnya partai terjebak dalam pragmatisme. Jika fenomena semacam ini terjadi maka, ideologi partai hanya menjadi jargon belaka yang tertuang dalam anggaran dasar partai, tetapi tidak akan tergambar dalam aktivitas politik kader-kader partai (Karim, 2018). Dalam penelitian yang lain juga memberikan gambaran sistem politik Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah reformasi, terutama dengan munculnya banyak partai politik. Sebaliknya, jumlah peserta pemilihan umum yang rendah mengurangi kemungkinan partai politik baru untuk mendapatkan suara mutlak. Akibatnya, akan sulit bagi partai politik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Pada kenyataannya, koalisi dapat terbentuk bukan hanya antara partai yang memiliki ideologi yang sama, tetapi juga antara partai yang memiliki ideologi yang berbeda. Koalisi ini dapat terbentuk jika mereka menginginkan kekuasaan. Dalam aktivitas politik, figur menjadi sangat penting karena partai politik lebih fokus pada figur daripada mengkampanyekan ideologi partai sebagai daya tarik (Prasetya, 2011). Ideologi tinggal menjadi teks dalam naskah tidak termanifestasikan melalui tindakan politik partai. Padahal, ideologi dapat memperkuat pembangunan politik dan memperjelas gerak juang setiap partai politik.

Penelitian yang lain menjadi perbandingan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh setiap kader partai politik cenderung sangat politis hanya menjadi Pesan-pesan kampanye yang menggambarkan kedekatan emosional bersama rakyat. Tetapi gaya komunikasi politik

semacam ini hanya terlihat pada saat kampanye saja. Sehingga komunikasi politik mencerminkan pragmatisme terhadap ideologi politik partai, semua hanya tergantung kepentingan (Fitriyanti dkk, 2025). Dukungan dari berbagai pihak mengesampingkan perbedaan ideologi demi mencapai tujuan elektoral.

Secara keseluruhan, beberapa penelitian di atas menggambarkan fenomena kemunduran penguatan ideologi partai politik di Indonesia. Ideologi politik tidak lagi menjadi pilar utama dalam aktivitas partai, melainkan menjadi instrumen pragmatis dalam mencapai kekuasaan. Hal ini memengaruhi proses pembangunan politik yang seharusnya dapat lebih kokoh melalui konsistensi ideologi yang jelas dan tegas.

Komunikasi politik yang efektif tentunya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat dimana konsep, gagasan dan tujuan politik dapat disampaikan serta dapat diterima dan oleh masyarakat. Komunikasi politik bukan hanya tentang pesan dan retorika, tetapi juga bagaimana kekuatan politik dimanifestasikan dalam interaksi antara partai politik, media, dan masyarakat (Tambunan, 2024). Pesan politik yang disampaikan oleh kader partai (politisi) melalui komunikasi politik mesti berdasarkan nilai-nilai ideologi partai tersebut (Randiawan dkk, 2023). Komunikasi politik menjadi sarana untuk menghubungkan aktor politik (politisi) dengan masyarakat melalui pesan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mencerminkan identitas ideologis partai. Jika komunikasi politik berjalan efektif dan berbasis pada ideologi yang jelas, maka masyarakat dapat lebih memahami posisi politik suatu partai dan bagaimana kebijakan yang ditawarkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Komunikasi politik merupakan aspek penting dalam dinamika partai politik, terutama dalam sistem demokrasi (Simarmata, 2014). Partai politik dengan ideologi berbeda sering menghadapi tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif baik di dalam internal partai, antarpartai, maupun dengan masyarakat. Padahal, ideologi dalam partai politik semestinya menjadi alat dalam membangun konsensus politik yang sehat. David Easton (dalam Maswadi Rauf, 1993) komunikasi politik menjadi seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari perilaku sosial, nilai-nilai otoritas dan dialokasikan kepada masyarakat. Pendapat ini memberikan gambaran yang cukup kompleks bahwa komunikasi politik berdasar pada kondisi politik yang sangat dipengaruhi oleh tindakan komunikator. Tindakan komunikasi politik dalam partai politik saat ini cenderung tidak menggambarkan ideologi partai tersebut. Hal ini menjadi *gap* dalam penelitian ini sehingga menemukan hipotesis yang konkret bahwa adanya kesenjangan pada keadaan yang sebenarnya. Aktivitas komunikasi politik seringkali tidak berjalan efektif dilakukan partai politik karena dipengaruhi banyak faktor termasuk komunikasi politik yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideologi partai tersebut.

Jika komunikasi politik tidak mencerminkan ideologi partai atau hanya digunakan sebagai alat retorika tanpa substansi yang jelas, maka interaksi antara partai dan masyarakat bisa kehilangan esensi demokratisnya (Pugu, 2024). Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi skeptis terhadap partai politik dan komunikasi politik yang disampaikan hanya menjadi sekadar propaganda tanpa makna yang mendalam. Komunikasi politik yang efektif tidak hanya memastikan bahwa gagasan dan tujuan politik tersampaikan dengan baik, tetapi juga harus berakar pada nilai ideologi yang diusung partai agar memiliki kohesi dan kredibilitas yang kuat di mata masyarakat.

Komunikasi politik merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi, di mana partai politik dan aktor politik berperan dalam menyampaikan gagasan, membangun citra, serta memengaruhi opini publik (Mudhoffir, 2006). Dalam konteks ini, penguatan karakter

komunikasi politik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideologi partai yang dianut. Penguatan karakter komunikasi politik berbasis ideologi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang konsisten, kredibel, dan berintegritas. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ideologi, komunikasi politik dapat lebih terarah dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja partai kepada masyarakat. Hal ini juga mencegah terjadinya komunikasi yang pragmatis dan oportunistik yang hanya berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek.

Elit dan pimpinan partai politik memiliki kepentingan besar dalam menciptakan citra politik melalui komunikasi politik, sebagai usaha untuk menghasilkan stabilitas sosial dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, para politisi berupaya untuk membentuk dan menjaga tindakan politik yang meningkatkan citra positif, agar dukungan publik bisa diraih dari rakyat (Muchtar, 2016). Citra partai yang berdasarkan ideologinya cukup penting hal ini untuk melihat gambaran nilai dan tindakan para politisi dari partai tersebut, dan dapat menggambarkan kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip ideologi partai.

Penguatan karakter komunikasi politik sangat diperlukan dan menjadi sangat penting dalam proses perkembangan demokrasi (Kramer, 2024). Demokrasi yang sehat tentunya ditunjang oleh aktivitas partai politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Penguatan karakter Komunikasi politik dalam penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan sudut pandang partai berdasarkan pada nilai ideologi partai. Studi penelitian ini fokus pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabenenya partai ini cenderung mencerminkan ideologi nasionalisme dan kerakyatan ala Soekarno. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang mengubah gagasan politik ideologis menjadi keputusan politik pembangunan segala bidang kehidupan untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat, sehingga aktivitas politik yang dilahirkan menjadi keputusan politik yang berjiwa Pancasila. Hal ini dinggap sebagai tugas ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kepentingan rakyat (Anggaran Dasar PDI Perjuangan, 2024). Dilihat dari narasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mereka dikenal dengan partai *“wong cilik”* kerapkali dianggap sebagai partai yang dekat dengan rakyat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, dan politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana ideologi partai diterjemahkan dalam komunikasi politik. salah satu daerah yang unik menurut peneliti Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter politik yang unik, namun belum banyak kajian yang mengeksplorasi bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai nasional mengadaptasi komunikasinya di tingkat lokal. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikenal sebagai partai yang berbasis ideologi nasionalisme dan kerakyatan, tetapi masih perlu diteliti sejauh mana ideologi ini benar-benar tercermin dalam komunikasi politik para kader.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana gambaran Nilai-nilai Ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karakter komunikasi politik berbasis ideologi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks partai politik, dan Bentuk-bentuk penguatan karakter komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya permasalahan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif Sejauh mana ideologi partai berperan dalam membentuk karakter komunikasi politik para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sebagian besar penelitian komunikasi politik cenderung fokus pada strategi kampanye, teknik persuasi, atau peran media dalam komunikasi politik. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti bagaimana ideologi partai dapat berperan dalam membentuk karakter komunikasi politik kader dan pengurus partai. Dengan kebaruan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian komunikasi politik, khususnya dalam memahami bagaimana ideologi partai dapat menjadi landasan utama dalam membangun karakter komunikasi politik yang kuat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, berfokus pada penguatan karakter komunikasi Politik berbasis ideologi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan. Upaya ini dilakukan untuk melihat nilai-nilai Ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karakter komunikasi politik berbasis ideologi dapat diterapkan secara efektif, dan Bentuk-bentuk penguatan karakter komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sulawesi Selatan tentunya permasalahan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif sejauh mana ideologi partai berperan dalam membentuk karakter komunikasi politik para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini melibatkan sembilan narasumber dari unsur yang mewakili dari Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Sulawesi Selatan (empat orang), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dua orang), akademisi/pengamat politik (tiga orang). Tahapan penelitian mencakup identifikasi masalah, perancangan kerangka penelitian, pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis data, dan interpretasi temuan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi ideologi partai berperan dalam membentuk karakter komunikasi politik para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tahap penelitian yang dilakukan menjadi indikator dalam melihat gambaran hasil penelitian mengenai penguatan karakter komunikasi politik berdasarkan ideologi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan merupakan cita-cita bersama. Sebagai partai ideologis yang berazaskan pancasila sebagai ideologi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berperan aktif dalam usaha mencapai cita-cita bersama (Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang partai sebagai sarana memperjuangkan dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga berfungsi sebagai sarana perjuangan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme, dan sosio-demokrasi (Trisila). Sebagai sarana perlawanan terhadap berbagai bentuk untuk individualisme dan untuk menghidupkan nilai serta semangat kebersamaan dalam sosial, kebangsaan, dan kenegaraan (Ekasila). Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berfungsi sebagai komunikasi politik, memajukan dan memperkuat partisipasi politik warga negara dengan cara mengimplementasikan ajaran-ajaran bung Karno sebagai teori

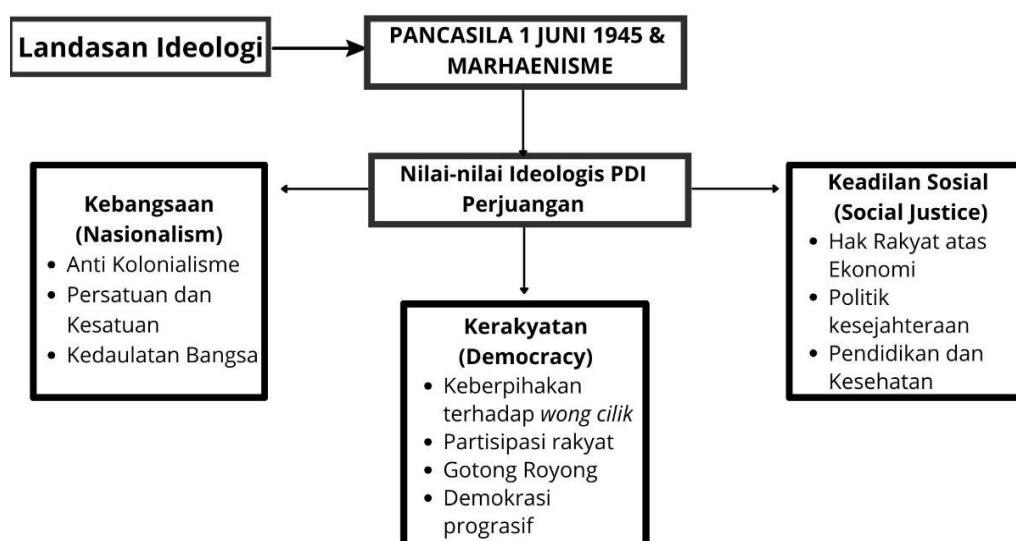
perjuangan dan tujuan politik (Anastasia & Sultani, 2018; Hidayat & Haryono, 2024). Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Andi Ridwan Wittiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan

“Nilai ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat Soekarnoisme, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memegang teguh Pancasila yang dirumuskan Soekarno pada 1 Juni 1945, Menurut kami sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nilai ini menjadi semangat perjuangan partai. Tidak lepas dari semangat ini menjadi prinsip ideologis partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berperan sebagai pelopor partai ideologis yang memegang teguh nilai sejarahnya, bertujuan menciptakan gerakan politik yang berakar dari kekuatan rakyat demi mencapai kesejahteraan yang adil secara sosial (Krisdianto dkk, 2020). Akibatnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu semangat perjuangan, mengkonsolidasi visi dan misi partai, mengorganisir aksi dan kekuatan rakyat, mendidik serta membimbing rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua potensi rakyat dalam satu gerakan politik untuk meraih kemerdekaan politik dan ekonomi (Widhyartono & Munir, 2019). Dengan demikian, Partai harus memperjuangkan hak-hak rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya demi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan spiritual seperti kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Irhamsyah Gaffar Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan: "... sebagai sebuah partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkomitmen untuk meraih kekuasaan politik secara konstitusional sebagai sarana untuk mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa indonesia dan seluruh wilayah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam kehidupan dunia. Salah satu tujuan partai yang penting untuk diperhatikan adalah menggalang solidaritas dan membangun kolaborasi lewat komunikasi politik yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Gambar 1. Peta konsep nilai ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Peneliti, 2025)



Pancasila dan Marhaenisme menjadi landasan ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian dijabarkan dalam tiga pilar utama perjuangan yaitu, Kebangsaan Menekankan kedaulatan negara, anti-imperialisme, dan persatuan nasional. Kerakyatan Berbasis demokrasi gotong royong, partisipasi rakyat, dan perlindungan terhadap *wong cilik*. Keadilan Sosial Berfokus pada distribusi ekonomi yang adil, kesejahteraan rakyat, dan hak atas pendidikan serta kesehatan.

Nilai-nilai ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak lepas dari semangat Marhaenisme Soekarno yang tertuang dalam prinsip-prinsip partai secara tidak langsung. Nilai dan semangat Pancasila 1 Juni 1945 diadopsi secara langsung dalam gerakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang melabeli dirinya sebagai partai *wong cilik* menjadi manifestasi dari prinsip ideologis partai (Amin, 2016; Kurniasih, 2019). Irisan ideologis ini menjadi arah dan tujuan gerak partai seperti tujuan yang tertuang dalam TRI SAKTI Soekarno. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Hasnawi Haris akademisi dan pengamat politik menyatakan

“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang sangat *Trah* Soekarno, partai ini sangat identik dengan semangat perjuangan Marhaenisme. Prinsip ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dikatakan Nasionalisme Kiri. pemikiran Bung Karno yang mengembangkan konsep Marhaenisme suatu bentuk sosialisme khas Indonesia yang menekankan kemandirian rakyat kecil. Bung Karno menentang imperialisme dan kapitalisme global yang dianggap merugikan bangsa. Konsep ini juga menjadi salah satu dasar ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perjuangannya”.

Mengimplementasikan nilai-nilai ideologis menjadi identitas dan sebagai utama partai yang dibangun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang muncul dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Bermula dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi perjuangan politiknya. Sebagai partai yang berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuatan politik. Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada *wong cilik*, partai ini terus berjuang untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Wawancara dengan Muh. Ikbal Arifin Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan, menyatakan: “... dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasal 5 ayat 2 Jati diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercermin dalam tiga pilar utama perjuangan. Pertama, kebangsaan, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpegang teguh pada prinsip nasionalisme yang diwariskan oleh Bung Karno. Kebangsaan bukan sekadar identitas, tetapi juga komitmen untuk menjaga kedaulatan negara, memperkokoh persatuan, serta menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Dalam perjuangannya, partai ini selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, memastikan bahwa Indonesia berdiri tegak dengan kepribadiannya sendiri di tengah pergaulan dunia. Kedua, kerakyatan bahwa Sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadikan aspirasi dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Gotong royong, keberpihakan kepada *wong cilik*, serta demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas menjadi prinsip utama dalam

setiap kebijakan dan perjuangan politik. Kerakyatan berarti memastikan bahwa kekuasaan tidak dikuasai oleh segelintir elite, tetapi benar-benar digunakan untuk melayani dan memberdayakan seluruh rakyat Indonesia. dan Ketiga, Keadilan sosial bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjuang untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Partai ini menolak segala bentuk ketimpangan dan terus memperjuangkan kebijakan yang memastikan kesejahteraan rakyat secara merata”.

Dengan semangat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang menyebut dirinya sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa dan menjadi wadah komunikasi politik bagi masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki karakter komunikasi politik yang ideologis dan cenderung sangat terbuka sehingga memiliki pendukung yang cukup militan dan terterima pada rakyat kelas bawah. Adanya dukungan militan dari masyarakat terhadap partai tentunya dibangun melalui komunikasi politik yang masif dan terbuka, Komunikasi politik yang masif serta dapat diterima oleh masyarakat karena komunikasi politik tersebut membawa pesan-pesan perjuangan partai yang selama ini dicita-citakan bersama.

Karakter komunikasi dalam partai politik mesti tercermin nilai ideologis untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada pemerintah dan kepada rakyat (Putranto, 2024). Jika komunikasi politik tidak mencerminkan ideologi partai tentunya komunikasi politik yang dilakukan cenderung sangat politis dan sarat akan kepentingan individu tentunya akan berdampak pada citra partai yang cenderung tidak memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum (Firmanzah, 2010). Oleh karena itu, karakter komunikasi politik dalam partai mesti mencerminkan ideologi partai itu sendiri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang dikenal sangat ideologis dalam aktivitas politiknya, tetapi partai yang ideologis belum berarti mencerminkan karakter komunikasi politik yang ideologis. Hal ini menjadi menarik jika ditelaah lebih dalam mengenai karakter Komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Karakter menjadi kunci yang strategis termasuk dalam kegiatan-kegiatan politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang mengusung ciri politik kerakyatan, menempatkan rakyat kecil sebagai aktor utama dalam setiap aktivitas komunikasi politiknya (Said dkk, 2023). Ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019 di mana narasi-narasi yang digunakan menekankan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perjuangan melawan oligarki dan kapitalisme global.

Komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berbasis keberpihakan terhadap *wong cilik*, Komunikasi politik bisa menjadi penciri dan identitas partai dalam konteks realitas politik, terdapat tantangan menjaga kesinambungan antara komunikasi populis dengan kebijakan nyata (Juri, 2015; Gani dkk, 2023). Narasi keberpihakan terhadap *wong cilik* berbenturan dengan dinamika politik praktis, di mana keputusan partai tidak selalu sejalan dengan ekspektasi publik yang kritis.

Menurut anggota pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan, karakter dan ciri khas komunikasi politik sangat mencirikan keberpihakan kepada rakyat kecil (*grassroot*). Pola komunikasi mencirikan ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sama seperti yang disampaikan oleh akademisi politik bahwa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memainkan narasi-narasi yang cenderung populis melalui hal ini kemudian mereka memiliki pendukung-pendukung yang sangat militan.

Tabel 1. Karakter Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Berdasarkan Ideologi

Aspek	Pancasila 1 Juni 1945	Marhaenisme Bung Kurni	Karakter Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Landasan Ideologi	Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan	Ideologi kerakyatan yang menolak kapitalisme dan imperialisme	Menggunakan komunikasi yang berbasis nilai kebangsaan dan keberpihakan kepada <i>wong cilik</i>
Pendekatan Politik	Demokrasi Gotong Royong sebagai sistem pemerintahan	Sosialisme khas Indonesia (keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil)	Komunikasi politik yang mengedepankan persatuan, gotong royong, dan anti-elitisme
Keberpihakan	Menekankan kesejahteraan seluruh rakyat dan persatuan nasional	Berpihak kepada kaum marhaen (rakyat kecil, buruh, petani)	Komunikasi yang menegaskan peran negara dalam melindungi dan memberdayakan rakyat kecil
Gaya Retorika (Komunikasi)	Berbasis nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami rakyat	Retorika yang tegas, lugas, dan sering mengangkat perjuangan rakyat
Peran Sejarah	Mengacu pada pidato Bung Kurni 1 Juni 1945 sebagai dasar negara	Mengakar pada pemikiran Bung Kurni tentang rakyat kecil	Komunikasi politik sering menggunakan simbolisme sejarah dan ideologi Soekarnoisme

Data dalam tabel ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencerminkan gabungan antara nasionalisme Pancasila 1 Juni 1945 dan sosialisme Marhaenisme, dengan gaya komunikasi yang tegas, pro-rakyat, dan berbasis gotong royong. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai *Trah Soekarno* pemikiran dan gagasan tumbuh subur dalam gerak politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini kemudian menjadi penciri partai bermoncong putih ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi salah satu partai tertua dan partai besar di Indonesia bahkan pernah menjadi partai pemenang pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Wawancara dengan Andi Ridwan Wittiri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan: "Sebagai kader Partai tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar Partai, langkah dan aktivitas politik kader harus mencerminkan dan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setiap kader memiliki tanggungjawab dalam membumikan nilai-nilai perjuangan partai. Termasuk dalam melakukan komunikasi politik baik komunikasi keatas ataupun kebawah mesti mencerminkan nilai ideologis partai".

Berdasarkan data hasil wawancara pengamat politik Asratillah mengatakan: "... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satu partai yang akan tetap eksis dalam pemilihan

umum, hal demikian dipengaruhi oleh identitas dan cara komunikasi politik yang dilakukan cenderung sangat populis dalam membangun citra kerakyatan. ader mereka di doktrin menjadi kader yang militan melalui sekolah kader dengan berprinsip pemikiran-pemikiran bung Karno, menghidupkan pemikiran dan nilai perjuangan bung Karno”.

Karakter komunikasi dalam politik sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik, melalui komunikasi politik partai dapat membangun citra serta membangun basis massa (Budiardjo, 2008). Partai juga mesti meningkatkan konsistensi antara Narasi yang dibangun berdasarkan prinsip ideologis dan Kebijakan yang diambil dalam pemerintahan mesti sejalan dan sesuai dengan cita-cita dan tujuan partai politik (Vaccari, 2021). Salah satu tantangan dalam komunikasi politik yaitu menjaga keselarasan antara apa yang disampaikan dengan realitas kebijakan yang diterapkan. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin tetap menjadi partai yang dipercaya *wong cilik*, maka retorika dan komunikasi yang dibangun tentang keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel. 2 Bentuk Penguatan Karakter Komunikasi Politik

Bentuk Penguatan Karakter Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tujuan dan Dampak
Nasionalisme (Kebangsaan): Meningkatkan komunikasi berbasis simbol-simbol nasional dan sejarah perjuangan Bung Karno, serta menekankan narasi kedaulatan negara dan anti-imperialisme dalam kampanye politik.	Memperkuat identitas nasional partai dan Membangun rasa bangga dan cinta tanah air di kalangan kader dan simpatian.
Democracy (Kerakyatan): Mengoptimalkan komunikasi langsung dengan rakyat melalui diskusi publik, temu kader, dan blusukan serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui platform digital dan media sosial.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada <i>wong cilik</i> .
Social Justice (Keadilan Sosial): Mengangkat isu-isu ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan hak-hak kaum buruh serta petani dalam komunikasi politik, serta memperkuat komunikasi politik berbasis advokasi untuk kelompok rentan dan marginal.	Meningkatkan citra partai sebagai pembela kaum kecil dan menguatkan solidaritas internal partai dan simpatian.

Komunikasi politik menjadi aspek yang cukup sentral dalam perkembangan dinamika demokrasi, melalui komunikasi politik aktor politik bukan hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga membentuk citra, identitas, dan karakter politik partai mereka di hadapan publik. Salah satu pendekatan klasik yang masih relevan hingga saat ini dalam memahami hubungan antara komunikasi dan karakter politik adalah teori Retorika Politik pemikiran Aristoteles dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Kenneth Burke (Arrianie, 2023). Aristoteles menekankan tiga pilar penting dalam komunikasi politik yaitu, *ethos* (karakter), *pathos* (emosi), dan *logos* (pengetahuan) (Aristoteles, 2018). *Ethos* sangat berkaitan erat dengan pandangan publik terhadap karakter dan moral seorang aktor politik. Kredibilitas dan karakter aktor politik mencakup sejauh mana seorang aktor politik dianggap jujur, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh publik.

Komunikasi politik bukan hanya menjadi alat penyampaian pesan, tetapi juga menjadi cermin dari aktor politik. Seorang aktor politik yang secara konsisten menunjukkan kesantunan berbahasa, kedalaman berpikir, dan sikap empati melalui komunikasinya akan dipersepsikan sebagai pribadi yang berkarakter kuat, bijaksana, dan layak dipercaya. Berdasarkan teori retorika yang dicetuskan oleh Aristoteles bahwa komunikasi politik dapat membentuk dan mencerminkan karakter politik melalui pembiasaan narasi dan gaya yang menunjukkan nilai-nilai ideologis partai politik yang menjadi identitas aktor politik. Karakter politik yang terbentuk ini menjadi bagian dari identitas politik seorang tokoh di mata publik. Dalam praktik politik modern, di mana citra dan persepsi memainkan peran penting dalam elektabilitas dan legitimasi, maka kemampuan membangun *ethos* melalui komunikasi menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik.

Penciri komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan nilai-nilai ideologi partai mencakup penguatan identitas nasionalisme, keberpihakan pada rakyat kecil, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Upaya tersebut tidak hanya menjaga kesinambungan nilai-nilai ideologi partai, tetapi juga memperluas basis dukungan masyarakat dalam berbagai lapisan (Hill, 2003). Narasi tentang keberpihakan kepada rakyat harus diiringi dengan kebijakan konkret yang pro-rakyat, seperti peningkatan kesejahteraan buruh dan petani, serta program ekonomi berbasis gotong royong. Konsistensi komunikasi dan kebijakan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti bahwa nasionalisme menjadi nilai ideologis yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu memperkuat citra partai sebagai partai yang dekat dengan rakyat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai nasionalisme tersebut terjebak pada retorika politik semata. Pendekatan kerakyatan yang digunakan dalam membangun kedekatan dengan masyarakat kecil dan memperluas basis dukungan. Namun, jika komunikasi politik ini tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang pro-rakyat, partai bisa dianggap hanya melakukan pencitraan politik. Pengarusutamaan keadilan sosial memperkuat citra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pembela rakyat kecil. Namun, dalam praktiknya, kebijakan partai yang berkoalisi dengan pemerintah seringkali dikritisi jika dianggap tidak sesuai dengan narasi keadilan sosial yang mereka perjuangkan.

Komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbasis ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme mencerminkan perpaduan antara nasionalisme kritis, populisme ideologis, dan perjuangan keadilan sosial. Komunikasi politiknya berhasil membangun identitas partai yang kuat dan menarik dukungan dari kalangan masyarakat bawah. Tantangan terbesar menjaga konsistensi antara retorika politik berbasis ideologi dengan implementasi kebijakan nyata. Jika komunikasi politik hanya bersifat pragmatis tanpa konsistensi ideologis, hal ini dapat mengurangi kredibilitas partai di mata publik. Penting bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tetap menjaga keseimbangan antara idealisme politik dan strategi praktis di tengah dinamika politik yang terus berubah. Penguatan identitas ideologis ini efektif dalam memperkuat loyalitas kader dan membedakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari partai politik lain. Melalui ciri komunikasi politik ini membantu menjaga integritas partai dan memperkuat basis dukungan massa.

Menggunakan perspektif politik kewarganegaraan, nilai ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni nasionalisme, demokrasi, dan keadilan yang dibangun berfungsi sebagai instrumen penting untuk memperkuat kohesi sosial dan meneguhkan nilai-nilai

kebangsaan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam konteks kewarganegaraan demokratis, komunikasi politik berbasis nasionalisme seharusnya tidak hanya menjadi retorika politik semata, tetapi menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

Pendekatan kerakyatan yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat dipahami sebagai upaya pengarusutamaan partisipasi warga negara dalam politik. Hal ini selaras dengan konsep *civic engagement*, komunikasi politik yang ideal mampu mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Ketika pendekatan ini hanya sebatas komunikasi tanpa implementasi kebijakan yang konkret, terjadi fenomena *political cynicism* atau sinisme politik yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Pandangan mengenai keadilan sosial dalam komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejalan dengan nilai yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai dapat mendorong pembentukan kesadaran kritis warga negara terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Jika ditinjau dari sudut pandang politik kewarganegaraan, penguatan karakter komunikasi politik yang berlandaskan ideologi nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak hanya berfungsi memperkuat identitas partai, tetapi juga membentuk budaya politik warga negara yang lebih partisipatif, kritis, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi relevan dalam membangun kewarganegaraan aktif yang sadar akan hak dan kewajibannya serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Penguatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan di tingkat elite partai, tetapi juga harus menyentuh kader dan simpatisan di berbagai tingkatan (Choi, 2007). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu memastikan bahwa setiap kader memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dan sejalan dengan ideologi partai. Perkembangan informasi digital sangat cepat dan tidak mengenal ruang dan waktu (Jurriens, 2020). Perkembangan ini mengharuskan partai untuk bertransformasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, komunikasi politik tidak lagi hanya melalui pidato dan pertemuan fisik, tetapi juga harus aktif di media sosial dan platform digital. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu memperkuat narasi politiknya melalui konten kreatif, edukatif, dan inspiratif yang dapat menjangkau generasi muda serta masyarakat luas. Misalnya, Penggunaan video pendek, infografis, *podcast*, dan diskusi daring harus lebih ditingkatkan untuk menyampaikan pesan politik yang mudah dipahami. Aktivitas digital tidak boleh hanya menjadi ajang propaganda, tetapi juga sebagai sarana interaksi langsung dengan rakyat untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap partai.

Penguatan karakter komunikasi politik dipengaruhi oleh prinsip ideologi partai, bahkan memengaruhi pola komunikasi politik. Kerap komunikasi politik sarat kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan politik (Waburton, 2024). Komunikasi politik partai yang pragmatis bertujuan untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik dalam bentuk kekuasaan, dukungan elektoral, maupun negosiasi politik dengan elit. Fenomena komunikasi politik ke atas atau komunikasi dengan elit politik sering kali menunjukkan pola tawar-menawar yang cenderung pragmatis. Partai politik tidak jarang harus menyesuaikan narasi ideologisnya dengan situasi politik yang sedang berlangsung demi mencapai kepentingan strategis tertentu. Pola komunikasi pragmatis ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa partai politik lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada memperjuangkan aspirasi rakyat.

Simpulan

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa penguanan karakter komunikasi politik berbasis ideologi partai memerlukan strategi yang mencerminkan nilai ideologis partai. Untuk menanamkan nilai ideologis partai memerlukan langkah serta pola pengkaderan yang terstruktur dan memiliki kurikulum pengkaderan partai yang jelas, agar komunikasi politik yang dilakukan oleh kader partai tidak sekedar politis dan hanya menjadi narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian secara pendekatan holistik dalam pendidikan kewarganegaraan yang meliputi *civic engagement* dan *civic participation* untuk memahami konteks dalam kajian politik kewarganegaraan. Dengan demikian, hasil penelitian berkontribusi teoretis dalam bidang politik dengan menawarkan wawasan tentang karakter komunikasi politik sesuai prinsip ideologis partai yang diterjemahkan dalam aktivitas politik kader partai.

Referensi

- Almond, Gabriel. (1960). *Budaya Politik: Tingkah Laku politik Dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amin, M. (2016). *Perkembangan Ajaran Marhaenisme Dalam Tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Anastasia, M. S., & Sultani, Z. I. M. (2018). Marhaenisme Soekarno Sebagai Modal Sosial Perjuangan Politik Nasionalisme Kelas Di Indonesia.
- Anggaran Dasar PDI Perjuangan Periode 2019-2024. Hasil Kongres V Denpasar Bali
- Aristoteles. (2018). *Retorika* (Seni Berbicara). Diterjemahkan oleh, Dede Sri Handayani , Penerbit BASABASI Press.
- Arrianie, L., & Si, M. (2023). *Komunikasi Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan 3. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Choi, N. (2007). Elections, Parties and Elites in Indonesia's Local Politics. *Journal South East Asia Research*, 15(3), 325–354. <https://doi.org/10.5367/ooooooooo7782717731>
- Creswell, J.W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*: Vol. Cetakan Ke 1 (P. A. Heppy El Rais, Ed.; 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Firmanzah, P. D. (2010). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriyanti, N., Puspitasari, R., Jasmine, T., & Putranto, A. (2025). Strategi Komunikasi Politik Digital Tri Andhianto dan Abdul Haris Bobihoe dalam Pilkada Bekasi 2024. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1), 652-662.
- Gani, J., Arrianie, L., & Ambarwati, A. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Di DKI Jakarta dalam Menyambut Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 1(2), 75-83.
- Hasnu., & Syam, Firdaus. (2021). Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP Dan Islam Moderat PKB. *Syntax Idea*, 3(7), 1621-1634. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1252>
- Heryanto, G. G. (2020). *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hidayat, D. S., & Haryono, E. (2024). *Politik dan Ideologi PDI Perjuangan 2000-2009: Memerintah dan Tetap Kritis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hill, D. (2003). Communication for a new democracy: Indonesia's first online elections. *Journal The Pacific Review*, 16(4), 525–547. <https://doi.org/10.1080/0951274032000132245>
- Juri, J. (2015). Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara melalui Pendidikan Politik (Studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang). *Jurnal Vox*

-
- Edukasi, 6(2), 123-142.
- Jurriëns, E. (2020). Indonesian Artivism: Layers of Performativity and Connectivity. *Journal Australian and New Zealand Journal of Art*, 20(2), 231-252. <https://doi.org/10.1080/14434318.2020.1837377>
- Kantaprawira, Rusadi. (1994). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Karim, N. (2018). Penguatan Ideologi Dalam Pembangunan Politik: Kasus Koalisi Partai Pendukung Di Provinsi Jambi. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 138-154.
- Krämer, B. (2024). Theorizing communication. The production of theory in communication journals. *Annals of the International Communication Association*, 48(4), 266-284. <https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2338826>
- Krisdianto, S. R., Anggadifa, Y. S., & Tamba, E. (2020). Penerapan nilai-nilai marhaenisme pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan Provinsi Jambi. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 16-28.
- Kurniasih, W. (2019). Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 261-270.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi politik dan pembentukan citra partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147. DOI: <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>
- Mudhoffir, A. M. (2006). Partai Politik Dan Pemilih: Antara Komunikasi Politik vs Komoditas Politik. *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, Hal 121.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52.
- Prasetya, I. Y. (2011). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30-40.
- Pugu, M. R. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Randiawan, R., Suryadi, K., & Bestari, P. (2023). Analysis of the Construction of the Meaning of Political Populism as Phenomenology in the Perspective of Civic Education. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(3), 419-430.
- Rauf, Maswadi & Narsun, Mappa. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Said, I. G., Santosa, N. E. T. I., & Zuhdi Dh, A. (2023). Ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019.
- Simarmata, S. (2014). Media baru, ruang publik baru, dan transformasi komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Interact*, 3(2), 18-36.
- Soemarno, A. P. (2002). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Tambunan, Tafsir. M. (2024). *Komunikasi Politik*. Banjar: Ruang Karya
- Vaccari, C. (2021). The International and Post-disciplinary Journey of Political Communication: Reflections on “Media-centric and Politics-centric Views of Media and Democracy: A Longitudinal Analysis of Political Communication and the International Journal of Press/Politics.” *Journal of Political Communication*, 39(2), 286-290. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1966599>
- Warburton, E. (2024). Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia. *Journal of Critical Asian Studies*, 56(2), 184-206. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069>
- Widhyartono, W., Kuswanjono, A., & Munir, M. (2019). Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila. *Jurnal Melayunesia Law*, 3(1), 107-134.